
Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada PT ABC

Muhimah Nur Afifah¹, Anita Handayani²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email : muhimah18.uc@gmail.com, anita.handayani@umg.ac.id

Abstrak

Sistem pembayaran yang digunakan PT ABC keseluruhan dilakukan secara kredit setelah pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja selesai dilakukan (*Sales Purchase Order*). Penjualan kredit tersebut menjadi faktor keterlambatan pembayaran piutang dikarenakan overbudget dari pihak vendor. Masalah ini terjadi karena sistem pengendalian piutang yang kurang efektif dalam PT ABC. Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pengendalian internal piutang serta dampak keterlambatan pembayaran terhadap arus kas dan operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan manajemen dan prosedur yang diterapkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC belum menerapkan sistem pengendalian internal piutang yang baik, terbukti dengan sistem operasional yang digunakan dalam PT ABC belum sepenuhnya dilakukan secara otomatis dan masih menggunakan metode manual. Hal tersebut yang memperlambat verifikasi pembayaran tagihan dari pihak vendor. Adanya dampak eksternal *overbudgeting* dari pihak vendor juga membuat keterlambatan pembayaran, terbukti pada bulan Mei, Juni, Juli dimana penjualan kredit menurun akibat menurunnya permintaan tenaga kerja pada PT ABC dan pembayaran terlambat akibat sepihnya permintaan dari vendor. Sehingga pembayaran dilakukan setelah kondisi keuangan vendor stabil.

Kata Kunci: sistem pengendalian, sistem pengendalian internal piutang, internal piutang

Abstract

The payment system used by PT ABC is entirely done on credit after the work performed by the labor force is completed (Sales Purchase Order). The credit sales became a factor in the delay of accounts receivable payments due to the vendor's overbudgeting. This problem occurs due to the ineffective accounts receivable control system at PT ABC. This study aims to analyze the issues in internal receivables control and the impact of payment delays on the company's cash flow and operations. The research method used is descriptive qualitative, which allows for an in-depth analysis of the management policies and procedures implemented through interviews and observations. The results indicate that PT ABC has not yet implemented a good internal control system for receivables, as evidenced by the operational system used in PT ABC not being fully automated and still relying on manual methods. That is what is delaying the verification of the bill payment from the vendor. The external impact of overbudgeting by the vendor also caused payment delays, evident in May, June, and July when credit sales decreased due to reduced labor demand at PT ABC and late payments due to low demand from the vendor. So that payment is made after the vendor's financial condition stabilizes.

Keywords: *control system, internal control system for receivables, internal receivables*

PENDAHULUAN

Pada era ekonomi digital, sistem akuntansi harus memberikan peran aktif dalam menyediakan informasi dan pengawasan seperti dalam dunia akuntansi atau pelaporan informasi keuangan (Dewa et al., 2022; Elisabeth, 2019; Susanti et al., 2023). Hal ini memaksa perusahaan untuk memiliki sistem akuntansi yang tepat agar lebih mudah dalam proses pelaporan informasi akuntansi. Terutama pada sistem pengendalian internal piutang yang sensitif terhadap alur penerimaan dan pengeluaran kas (A. Handayani, 2024; Pryhanni & Agha, 2023). Analisis dalam pengendalian internal piutang harus diperhatikan, diharapkan piutang-piutang dalam perusahaan tidak menjadi piutang tak tertagih yang akan merugikan perusahaan dari berbagai aspek (Anjarsari & Handayani, 2022; Saragih & Ardila, 2024). Salah satu strategi agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing secara efektif adalah dengan menjaga kinerja yang optimal (Santoso & Handayani, 2019). Sistem pengendalian internal yang efektif memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai, perusahaan dapat lebih mudah merumuskan dan menetapkan kebijakan manajerial yang tepat (Fizriah & Wirananda, 2022; Wulandari & Wijaya, 2023).

Piutang merupakan aset lancar yang diperoleh perusahaan melalui transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan, yang diharapkan dapat dikumpulkan dan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun (Azizah, 2024; Seftiani & Retnowati, 2021; Verantika et al., 2017). Dalam perspektif akuntansi, piutang dipandang sebagai tagihan yang harus dibayar oleh pihak eksternal perusahaan secara tunai kepada kreditur. Piutang termasuk dalam kategori aset lancar karena likuiditasnya yang tinggi, dengan proporsi signifikan terhadap total aset perusahaan yang bergantung pada faktor-faktor seperti jenis industri, periode waktu, kebijakan kredit, dan apakah perusahaan memberikan pembiayaan jangka panjang. (YANTI, 2021) mengklasifikasikan piutang menjadi tiga jenis utama, yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain, yang mencerminkan perbedaan penting dalam jenis piutang tersebut. Pada perusahaan jasa, piutang dicatat ketika layanan diberikan secara kredit, dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit pendapatan penjualan (Pratiwi, 2019; Puspasari & Kusnaeni, 2019; Simanjorang, 2015).

PT ABC merupakan perusahaan swasta berdasarkan Akte Pendirian Notaris Nomor 245, tanggal 14 September 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Astrid Rahmajati, SH, M.kn. bergerak dalam bidang penyaluran tenaga kerja *outsourcing* di PT WINA. Keduanya dalam bekerja sama terikat dalam kontrak dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut PT WINA membuat penawaran harga *outsourcing* beserta pasal-pasal hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Penawaran PT WINA berisi bahwasannaya pekerja *outsourcing* dibayarkan secara borongan per barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Namun, dari pihak penyedia jasa mempertimbangkan hal tersebut, karena bila pembayaran dilakukan dengan borongan maka harga dari pihak penyedia jasa ke tenaga kerja juga nilainya akan kecil. PT ABC mengupayakan agar tenaga kerja *outsourcing* mendapatkan upah yang selaras dengan UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten Gresik.

PT ABC kepada PGA (*Personal & General Affair*) PT WINA mengajukan agar pembayaran tenaga kerja sesuai dengan UMR Kabupaten Gresik yaitu Rp 4.642.031,- per bulannya. Jika dihitung per hari maka penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh tenaga

kerja yaitu sebesar Rp 185.680,-. Namun, pengajuan tersebut menjadi sering mengalami *overbudget* dari pihak penerima jasa karena keputusan dari pihak PT ABC tersebut. Karena, nominal tersebut juga belum termasuk manajemen fee yang diminta oleh pihak PT ABC yaitu sesuai dengan kontrak kerja sebesar 8% dari tagihan yang diberikan kepada pihak penerima jasa.

Berdasarkan perjanjian tenaga kerja dengan PT ABC juga disebutkan bahwa upah pekerja perhari yaitu senilai Rp 185.680,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan upah lembur yang dihitung perjam senilai Rp 26.833,- (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Sehingga, adanya kebijakan dari pihak PT ABC dan perjanjian antara tenaga kerja dengan perusahaan bahwasannya pembayaran tenaga kerja dilakukan secara harian, berdampak *overbudget* pada pihak penerima jasa dan tagihan yang diajukan dari PT ABC kepada pihak penerima jasa juga menjadi tidak lancar. Rata – rata tagihan pembayaran tenaga kerja dengan nominal diatas Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 sebagian besar belum terbayarkan.

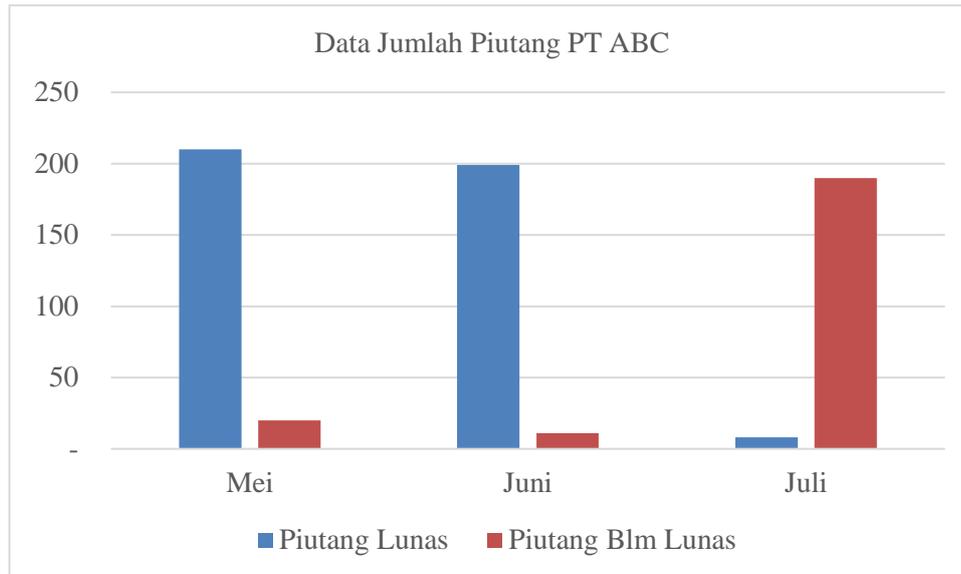
PT ABC sebagai perusahaan jasa untuk kebutuhan *supply* tenaga kerja pada PT WINA seiring berjalannya waktu pembayaran tagihan mengalami kesulitan dalam menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan penerima jasa. Perusahaan menganggap setelah adanya aktivitas jual beli jasa maka akan mendebet akun piutang karena perusahaan menganggap telah terjadinya piutang dan akan menambah saldo piutang.

Tabel 1. Jurnal pada akun piutang

Piutang Dagang PT. ABC	Rp 69.359.335
Penjualan	Rp 69.359.335

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan jurnal yang dijelaskan, perusahaan mendebet akun piutang karena menganggap bahwa piutang telah terwujud, dengan penambahan saldo piutang sebesar Rp 69.359.335 sesuai dengan nilai yang tertera pada invoice. Selain itu, perusahaan mengkredit akun penjualan karena telah mengakui bahwa serah terima pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja telah selesai, dengan nilai yang sama yakni Rp 69.359.335, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam invoice. Penjualan secara kredit memberikan tenggat waktu pembayaran kepada pelanggan, yaitu piutang akan ditagih 30 hari setelah penerbitan invoice, yang kemudian dirangkum dalam rekap piutang. Proses pengisian rekap piutang dilakukan secara komputerisasi, yang secara otomatis akan menambah saldo piutang pelanggan, sehingga pada akhir periode, jumlah total piutang yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan dapat diketahui.



Gambar 1. Grafik Jumlah Total Invoice yang terbayar dan belum terbayar

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024)

Dalam grafik tersebut pada bulan Mei terdapat total 310 *invoice* diantaranya 290 *invoice* sudah dibayarkan dan 20 *invoice* belum dibayarkan. Pada bulan Juni terdapat total 210 *invoice* diantaranya 199 *invoice* sudah dibayarkan dan 11 *invoice* belum terbayarkan. Total *invoice* yang terbilang turun dari sebelumnya ini membuktikan bahwa pada bulan Juli penjualan tenaga kerja menurun sebab permintaan PT WINA yang tidak banyak. Hal tersebut dikarenakan proyek dan produksi PT WINA sedang tidak banyak orderan seperti pada bulan Mei. Pada bulan Juli terdapat total jumlah 198 *invoice* diantaranya 8 *invoice* yang sudah dibayarkan 190 *invoice* yang belum dibayarkan. Bulan Juli terdapat kenaikan jumlah *invoice* yang belum dibayarkan, hal tersebut karena adanya *overbudgeting* dari PT WINA dan keadaan pabrik yang sedang menurun intensitas produksinya. Menurunnya intensitas produksi tersebut karena orderan PT WINA yang memang sepi dan keadaan cuaca yang buruk sehingga produksi yang belum bisa dikirimkan melalui jalur laut.

Meskipun pekerjaan tenaga kerja sudah selesai dan *invoice* sudah diserahkan ke PT WINA, proses pembayaran memakan waktu paling cepat sekitar 3 minggu atau lebih. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan antara lain yaitu, proses verifikasi data tagihan yang masuk pada PT WINA atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh tenaga kerja. *Overbudgeting* dari PT WINA karena sering mengalami kelebihan anggaran yang membuat mereka menunda pembayaran hingga anggaran mereka sesuai dengan rencana keuangan. Kondisi eksternal seperti masalah logistik dan kondisi cuaca buruk sehingga mempengaruhi pengiriman produk PT WINA sehingga produksi produk terhambat dan menambah keterlambatan pembayaran tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan mengakibatkan arus kas PT ABC terganggu dan berdampak pada operasi perusahaan, terutama penggajian tenaga kerja (Maryani et al., 2024).

Menurut penelitian (Diana, 2022) keadaan sistem pengendalian internal piutang kurang efektif hal ini dapat dilihat dari belum semua terlaksananya komponen COSO. Prosedur sistem pengendalian internal sudah cukup baik hal ini dilihat dari adanya pengajuan dari anggota sampai tahap monitoring ke anggota. Penilaian sistem pengendalian internal kurang efektif hal ini dilihat dari tidak adanya pemisahan fungsi

piutang dan tidak dilakukannya rotasi jabatan, laporan potongan Tukin tidak disampaikan kepada anggota dan piutang ragu-ragu tidak diperiksa.

Penelitian (Lara, 2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal piutang di PT. Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurangnya tanggung jawab tim marketing dalam menangani pembayaran piutang yang telah jatuh tempo, masih adanya kejadian retur penjualan pada piutang yang jatuh tempo, pemberian piutang kepada pelanggan dengan riwayat pembayaran buruk, serta penagihan yang sepenuhnya dipercayakan kepada tim marketing sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan uang setoran. Selain itu, pengawasan admin keuangan terhadap piutang yang lewat jatuh tempo kurang efektif, ditambah dengan peran ganda sebagai kasir yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru (novelty) dengan mengevaluasi implementasi sistem pengendalian internal piutang berdasarkan kerangka COSO. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem tersebut guna menghadapi tantangan yang ada. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang di PT ABC. Dengan sistem pengendalian yang lebih baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko piutang tak tertagih, menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan kinerja operasional.

Berdasarkan informasi di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi dan mengevaluasi pengendalian internal piutang pada PT ABC dan dampak terjadinya keterlambatan pembayaran piutang pada PT ABC. Penelitian ini dilakukan agar PT ABC dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melakukan pengendalian piutang dengan optimal dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal piutang di PT ABC, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi PT ABC tetapi juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dengan tantangan serupa. Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, memberikan solusi praktis bagi PT ABC untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang; kedua, memperkaya literatur tentang pengendalian internal piutang dengan pendekatan yang berbasis kerangka COSO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data historis dan fenomena yang terjadi pada perusahaan sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, observasi terhadap proses pengelolaan piutang di perusahaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tim keuangan untuk mendapatkan wawasan terkait pengendalian internal yang diterapkan di perusahaan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana kriteria informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti, memiliki intensitas yang cukup tinggi dalam memberikan informasi yang relevan, tidak merekayasa informasi, memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi, dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun narasumber penelitian sebagai berikut;

1. Ibu Irawati selaku Kepala *Finance* pada PT. ABC yang bertanggung jawab atas perpajakan dan penerimaan serta pengeluaran kas (informan 1).
2. Ibu Nur Laila selaku *Team Finance* pada PT. ABC yang bertanggung jawab atas berita acara tagihan selesai dan pengiriman berkas secara *online* melalui google drive dan link intip.in yang sudah disediakan oleh pihak penerima jasa.

Data sekunder, termasuk rekapan perusahaan dengan mengakses arsip dan dokumen yang telah diizinkan. Berkaitan dengan piutang, seperti kebijakan kredit, prosedur penagihan, total piutang yang telah terbayar dan belum terbayar, *invoice*, berita acara penagihan dan transaksi penjualan jasa tenaga kerja yang telah dicatat dalam arsip seperti pada *link* intip.in yang dapat diakses perusahaan dan penerima jasa. Metode teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah pengumpulan data, hingga mencapai titik jenuh (F. Handayani et al., 2022). Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada aturan COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu memverifikasi data dari berbagai sumber, cara, dan waktu (Kuantitatif, 2016). Sebagai contoh, pengecekan dilakukan pada data *invoice* piutang yang sudah dan belum dibayar. Setelah dianalisis, kesimpulan diuji kembali dengan teknik membercheck, yakni meminta konfirmasi dari sumber data terkait temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian internal mencakup metode, struktur organisasi, dan ukuran yang dimaksudkan guna menjaga aset organisasi, memastikan keandalan data akuntansi, menaikkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2023). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi yang jelas, sistem wewenang, pencatatan yang melindungi aset, serta praktik sehat sesuai tanggung jawab. Komponen pengendalian internal piutang menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) terdiri dari lima elemen utama, yaitu (Amaliya & Ansori, 2024; Malia & Sisdianto, 2024);

- a. Lingkungan Pengendalian: Menyediakan dasar yang mendukung semua komponen pengendalian internal lainnya, yang mencakup integritas, nilai-nilai etika, filosofi manajemen, serta struktur organisasi yang mendukung pengendalian.
- b. Kegiatan Pengendalian: Prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi, seperti verifikasi piutang dan pengawasan transaksi kredit.
- c. Penaksiran Risiko: Proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, termasuk risiko terkait dengan pengelolaan piutang dan ketepatan waktu pembayaran.
- d. Informasi dan Komunikasi: Sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diperoleh dan disampaikan kepada pihak yang memerlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat, serta memastikan komunikasi yang efektif terkait dengan pengelolaan piutang.

- e. Pemantauan: Proses evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Secara umum, penjualan dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pembayaran yang sah, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Proses ini dilaksanakan dengan kontribusi tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut (Santoso & Handayani, 2019) salah satu faktor utama yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan adalah kinerja yang baik. Tingkat kinerja perusahaan berperan penting dalam mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang diambil. Di sisi lain, (Mulyadi, 2023) menjelaskan bahwa dalam penjualan kredit, setelah pesanan pelanggan dipenuhi melalui pengiriman barang atau pemberian jasa, perusahaan akan memiliki piutang yang harus dilunasi oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu.

Prosedur yang membentuk sistem dalam penjualan kredit meliputi langkah-langkah berikut:

- a. **Prosedur Order Penjualan**
Prosedur ini mencakup penerimaan dan verifikasi pesanan dari pelanggan. Pada tahap ini, informasi tentang produk atau jasa yang dipesan akan dicatat, serta data pelanggan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan pesanan.
- b. **Prosedur Persetujuan Kredit**
Pada prosedur ini, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kelayakan kredit pelanggan. Proses ini melibatkan pemeriksaan riwayat kredit pelanggan, kemampuan pembayaran, dan batas kredit yang disetujui. Tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko gagal bayar.
- c. **Prosedur Pengiriman**
Setelah pesanan disetujui, tahap ini mencakup pengiriman barang atau pemberian jasa kepada pelanggan. Proses ini melibatkan pengaturan pengiriman, pengepakan, serta dokumentasi terkait pengiriman untuk memastikan produk sampai ke pelanggan dengan baik.
- d. **Prosedur Faktur/Penagihan**
Setelah barang atau jasa dikirim, perusahaan akan membuat faktur yang mencantumkan rincian transaksi, termasuk jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Prosedur ini juga mencakup pengiriman faktur kepada pelanggan dan melakukan penagihan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati.
- e. **Prosedur Pencatatan Akuntansi**
Prosedur ini melibatkan pencatatan seluruh transaksi penjualan dalam sistem akuntansi perusahaan. Setiap transaksi dicatat dengan tepat untuk memastikan laporan keuangan yang akurat, termasuk pengelolaan piutang dan pembukuan yang berkaitan dengan penjualan kredit.

Piutang, dalam pengertian luas, mencakup semua tagihan kepada pihak luar perusahaan, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Namun, dalam akuntansi, piutang merujuk secara khusus pada tagihan yang akan diterima dalam bentuk uang tunai. Menurut (Seftiani & Retnowati, 2021), piutang adalah aset lancar yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan.

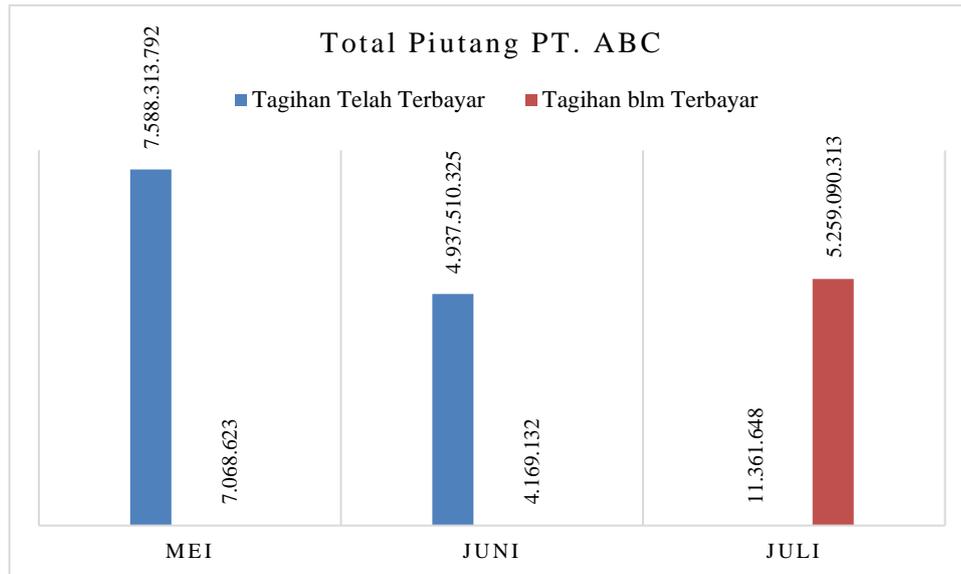
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap pengendalian internal piutang, mulai dari permintaan tenaga kerja hingga pembayaran upah tenaga kerja yang

sesuai dengan kesepakatan kontrak kedua belah pihak pada PT. ABC diketahui bahwa manajemen perusahaan memberikan perhatian yang baik, dari segi pengelolaan hingga pengawasan piutang tersebut. PT. ABC melakukan kegiatan usahanya dengan melakukan penjualan secara kredit, maka hasil penelitian kualitatif ini menyatakan bahwa prosedur penjualan secara kredit diperlukan pengendalian internal piutang yang efektif dan sesuai dengan SOP pada perusahaan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa meskipun prosedur pencatatan dan penagihan sudah ada, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Banyak *invoice* yang belum terbayarkan dan mengganggu pada arus kas perusahaan. Keterlambatan pembayaran piutang dapat berdampak langsung pada proses administrasi tenaga kerja. PT. ABC mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan administrasinya, yang mempunyai potensi dalam menurunkan kinerja operasional tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa pada bulan Juli, jumlah *invoice* yang belum dibayar terus meningkat, bertepatan dengan penurunan permintaan jasa dari PT. WINA.

Prosedur pengendalian yang ada termasuk penggunaan software untuk pencatatan piutang, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi karyawan PT. ABC dan PT. WINA juga perlu mempercepat proses verifikasi dan pembayaran piutangnya. Meskipun pekerjaan tenaga kerja sudah selesai dan *invoice* sudah diserahkan ke PT. WINA, proses pembayaran memakan waktu paling cepat sekitar 3 minggu atau lebih. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan antara lain yaitu, proses verifikasi data tagihan yang masuk pada PT. WINA atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh tenaga kerja.

Fenomena yang terjadi pada saat bulan Juli sekitar 190 *invoice* yang belum terbayarkan sehingga pembayaran dari mitra kerja yang terlambat karena *overbudget* pada keuangan PT. WINA pada bulan Juli yang mengakibatkan pembayaran harus diundur. Pembayaran pasti akan dilakukan dan tidak mungkin menjadi piutang yang tertagih seperti yang dijelaskan oleh *team finance* perusahaan. Pihak *team finance* perusahaan Ibu Irawati juga menjelaskan bahwa *overbudget* tersebut karena permintaan PT. ABC untuk setiap pembayaran tenaga kerja senilai dengan UMR Kabupaten Gresik. Sehingga pada bulan Agustus dana yang digunakan untuk membayar administrasi termasuk penggajian tenaga kerja merupakan dana cadangan. Hal tersebut dikarenakan tagihan bulan Juli yang belum terbayarkan. Kemudian pada bulan September penggajian tenaga kerja beserta administrasi lainnya dundur dan dibayarkan secara berkala. Pembayaran gaji tenaga dilakukan secara berturut-turut sebesar 40%, 40%, dan 20%.

Sistem kontrak yang menciptakan masalah dalam pencocokan biaya antara kedua belah pihak, sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran. Ketidaksepakatan atau perbedaan dalam sistem kontrak ini berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian pembayaran dan menambah tekanan keuangan bagi PT. ABC. Negosiasi yang rumit seringkali menimbulkan *overbudget* dari pihak penerima jasa karena pembayaran yang diminta setara dengan UMR yang dihitung perharinya gaji karyawan senilai Rp 185.680,- dan belum termasuk manajemen *fee* dari perusahaan penyedia jasa yaitu 8% dari nilai tagihan yang diajukan kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia.



Gambar 2. Jumlah Total Piutang PT. ABC

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa dari total piutang pada bulan Mei sebagian besar tagihan sudah dibayarkan dan sekitar Rp 7.068.623 tagihan belum terbayarkan dan menimbulkan piutang. Pada bulan Juni penjualan kredit perusahaan menurun diakibatkan permintaan tenaga kerja yang menurun dari PT. WINA. Hal tersebut mempengaruhi penjualan perusahaan, sehingga dari total penjualan kredit tersebut sebesar Rp 4.169.132 total tagihan yang belum dibayarkan. Penurunan penjualan tersebut mengalami kenaikan sedikit pada bulan Juli, namun hal tersebut siring dengan adanya overbudget dari PT. Wina mengakibatkan sebesar Rp 5.259.090.313 tagihan belum terbayarkan dan menimbulkan masalah.

Pengendalian Internal Piutang COSO (*Commite of Sponsoring Organizations*)

1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian internal yang efektif ditandai dengan adanya penggambaran tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan piutang dan penagihan piutang dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan PT ABC telah ditetapkan secara tertulis, seperti yang dipaparkan oleh narasumber bahwa,

“Struktur organisasi PT ABC telah ditetapkan secara tertulis dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, karena struktur hal yang penting bagi suatu perusahaan sehingga karyawan dapat mengetahui jenis wewenang dan tanggung jawab yang ada” (informan 1).

“Manajemen PT ABC sudah membuat kebijakan operasional dan punya kerja yang efisien hanya saja di beberapa admin memegang beberapa tanggung jawab dalam plant sehingga membuat tagihan yang masuk membutuhkan proses beberapa hari dan melalui pengawasan serta pengendalian yang sudah sesuai dengan syarat operasional perusahaan. Hal tersebut sudah menjadi tantangan bagi admin untuk segera menyelesaikan tagihan yang ada. Meskipun begitu admin tetap menyelesaikan tagihan tepat waktu untuk diserahkan kepada PT. WINA” (informan 2).

Jadi, lingkungan pengendalian perusahaan yang ada dalam PT ABC sudah terdapat pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Khususnya pada unit *finance* yang dalam bidangnya masih dipisah lagi dan mempunyai tanggung jawab di beberapa plant secara jelas dan terperinci.

2. Penentuan Resiko

Penentuan risiko penting bagi manajemen. Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran di PT ABC, diterapkan prinsip 5C dan diperbarui SOP penjualan kredit sesuai ketentuan perusahaan, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber melalui wawancara.

“PT. ABC telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk mengatasi adanya piutang tak tertagih, dulu awal mula PT. ABC didirikan terdapat beberapa pelanggan yang meminta tenaga kerja pada perusahaan. Perusahaan sudah menyeleksi sesuai dengan standar prosedur pemberian piutang karena penjualan pasti dilakukan secara kredit setelah pekerjaan pada perusahaan tersebut selesai dilakukan. Setelah adanya pandemi beberapa pelanggan tersebut memutuskan kontrak karena tidak sanggup untuk membayar tenaga kerja yang hingga kini beberapa tagihan dari beberapa perusahaan tersebut ada yang masih belum terbayarkan dan menimbulkan piutang tak tertagih sehingga tinggal PT WINA sebagai pelanggan utama perusahaan dari awal berdiri” (informan 1).

“Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) pasti selalu diterapkan dalam perusahaan, hanya saja dalam perusahaan ini kebetulan hanya satu pelanggan utama yaitu PT WINA yang pada dasarnya sudah dipercayai dalam aspek apapun. PT WINA bukan hanya kali ini melakukan keterlambatan pembayaran namun seringkali di beberapa bulan yang lalu juga mengalami hal yang sama hal tersebut sudah di jelaskan juga pada bagian PGA PT WINA. Tagihan tersebut pasti akan dibayar hanya saja menunggu tingkat perputaran keuangan PT. WINA stabil” Imbuh (informan 2).

Jadi penentuan risiko dalam mengendalikan piutang dalam PT. ABC terbilang cukup hati-hati dalam mengambil vendor untuk bekerja sama. Meskipun beberapa pelanggan kepercayaannya pada masa pandemi covid-19 memutuskan kontraknya. Hal tersebut terbukti pelanggan utamanya PT WINA yang telah menjadi vendor tetap PT. ABC pada awal berdirinya perusahaan tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan hasil pengamatan di PT ABC perusahaan, beberapa aktivitas pengendalian sudah diterapkan dan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan dengan penagihan piutang secara rutin dan selalu follow up lebih lanjut mengenai tagihan yang diserahkan kepada PT WINA. Dalam hasil wawancara narasumber menyatakan bahwa,

“Perusahaan dalam mengatasi adanya pengendalian piutang ini sebetulnya sudah memiliki cara tersendiri yaitu dengan mempunyai dana cadangan sebesar 3x perputaran penggajian tenaga kerja untuk menghindari dampak dari keterlambatan piutang tersebut. Fenomena ini bukan yang pertama kalinya bahkan bisa terjadi 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun. Setiap keterlambatan itu terjadi perusahaan hanya bisa follow up untuk pembayaran tersebut agar segera dibayarkan dan masalah administrasi dalam kantor bisa diatasi dengan baik” (informan 1).

“SOP perusahaan sudah dilakukan dengan baik namun keterlambatan ini masih mungkin terjadi dan kurangnya percepatan penagihan pada pihak admin juga membuat

tagihan tersebut akhirnya harus terlambat diserahkan pada PT WINA. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa hal, diantaranya kurang disiplinnya karyawan sehingga membuat tagihan tersebut molor dari target tanggal yang seharusnya. Tidak hanya itu sistem yang dilaksanakan secara manual membuat semua pekerjaan menjadi lama dalam proses penginputan tagihan” (informan 2).

Jadi, dalam aktivitas pengendalian yang terjadi pada PT ABC belum sepenuhnya efektif. Perusahaan hanya menunggu sampai pembayaran tersebut dilakukan oleh PT WINA dan *follow up* kembali ke penerima jasa agar segera membayarkan tagihan tersebut dan memberikan data nomor *invoice* yang belum terbayarkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Kerja sama PT ABC dan PT WINA terikat dalam suatu kontrak hal tersebut diungkapkan saat wawancara bahwa, “Sudah disetujui bersama bahwa PT WINA dalam memberikan informasi melalui email dan sering terjadi miss komunikasi. Dalam hal ini informasi dan komunikasi diantara belum berjalan dengan baik. Pada kontrak kerja sama tertulis bahwa PT ABC menggunakan link yang dapat diakses bersama yang bersangkutan yang telah disediakan pihak vendor. Tentunya hal tersebut dengan pengawasan PGA (Personalia & General Affair) PT WINA dan team finance PT ABC yaitu Intip.in. Semua informasi berkaitan dengan penagihan tersimpan dalam link tersebut yang akses nya hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan yaitu PGA (Personalia & General Affair) PT WINA dan team finance PT ABC” (informan 1).

“Pihak vendor seringkali memberikan informasi melalui sosial media Whatsapp untuk *chrosscheck* mengenai jumlah *invoice* yang masuk perharinya setelah diupload. Masalah tersebut dapat menimbulkan miss komunikasi juga, karena dari pihak PGA (Personalia & General Affair) dalam proses verifikasi awal seringkali kurang teliti. Namun kesalahan tidak bisa dipungkiri juga pihak admin juga seringkali tidak mencatat *invoice* dengan nomor berapa saja yang sudah di verifikasi dan diluncurkan ke pihak PT WINA” (informan 2).

Jadi dalam hal informasi dan komunikasi pada PT ABC dengan PT WINA seringkali terjadi miss komunikasi, sudah dijelaskan oleh informan tidak hanya pada pihak *finance* namun seringkali kesalahan tersebut juga terjadi pada departemen yang lainnya.

5. Kegiatan Pemantauan

Aspek dalam pengawasan internal adalah kualitas yang memiliki keterampilan dan integritas. “Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pengendalian internal piutang PT ABC tidak memiliki personel di bidang informasi teknologi (IT) dengan tugas khusus mengawasi pemeliharaan sistem (IT) dan menjaga keamanan sistem, pengelolaan data, pemecahan masalah teknis dan pemantauan jika terjadi sesuatu yang mencurigakan dengan sistem (IT) perusahaan saat ini (informan 1).

“Sistem yang digunakan juga masih bersifat tradisional dan belum otomatis sehingga saat ada keterlambatan pembayaran tidak bisa mengetahui secara jelas dan langsung *invoice* mana yang belum terbayarkan” (informan 2).

Tabel 2. Penyesuaian Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Piutang

No	Unsur-Unsur SPI	Teori COSO	PT ABC	Keterangan
1	Lingkungan Pengendalian	Tempat karyawan dalam perusahaan melakukan pekerjaan dan melaksanakan kewajiban untuk mengendalikan perusahaan.	Adanya pemisahan tugas yang sesuai dengan kewajiban masing-masing untuk sistem pengendalian internal piutang. Setiap admin pada bidang admin telah melakukan tanggung jawab atas pembayaran tagihan beberapa plant pekerjaan yang ada di dalam PT WINA.	Sesuai
2	Penentuan Resiko	Dapat melihat untuk jangka Panjang resiko yang dihadapi manajemen perusahaan sehingga dapat mengetahui pengelolaan resiko yang terjadi	Dalam menentukan resiko akibat adanya penjualan kredit yang menimbulkan piutang PT ABC terbilang cukup hati-hati dalam memilih vendor yang dipercayai untuk jasa ketenagakerjaan PT ABC. Meskipun sebelumnya terdapat beberapa perusahaan yang memutuskan kontraknya karena pandemi covid 19. Namun saat ini, PT ABC bangkit dan memiliki satu pelanggan tetap yang sangat loyal dengan PT ABC.	Sesuai
3	Aktivitas Pengendalian	Tindakan perusahaan untuk memastikan bahwa arahan manajemen sudah dilakukan dengan baik, guna meminimalisir adanya kesalahan yang akan timbul untuk jangka pendek dan jangka panjangnya.	Dalam aktivitas pengendalian yang terjadi pada PT ABC belum sepenuhnya efektif. Perusahaan hanya menunggu sampai pembayaran tersebut dilakukan oleh PT WINA dan <i>follow up</i> kembali ke penerima jasa agar segera membayarkan tagihan tersebut dan memberikan data nomor <i>invoice</i> yang belum terbayarkan.	Belum Sesuai
4	Informasi dan Komunikasi	Sistem informasi dan komunikasi antar dua belah pihak harus memadai, karena hal tersebut digunakan sebagai alat bertukar	Jadi dalam hal informasi dan komunikasi pada PT ABC dengan PT WINA seringkali terjadi <i>miss</i> komunikasi, sudah	Belum Sesuai

No	Unsur-Unsur SPI	Teori COSO	PT ABC	Keterangan
		informasi satu sama lain secara mudah pada suatu manajemen perusahaan.	dijelaskan oleh informan tidak hanya pada pihak <i>finance</i> namun seringkali kesalahan tersebut juga terjadi pada departemen yang lainnya.	
5	Kegiatan Pemantauan	Proses penilaian proforma dari sistem pengendalian internal, pemantauan mengenai aplikasi dan IT yang perlu untuk ditambahkan atau tidak.	“Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pengendalian internal piutang PT ABC tidak memiliki personel di bidang informasi teknologi (IT) dengan tugas khusus mengawasi pemeliharaan sistem (IT) dan menjaga keamanan sistem	Belum Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2024)

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan data dari berbagai informan. Proses ini melibatkan karyawan yang terlibat langsung dalam sistem pengendalian internal serta wawancara terstruktur dengan karyawan lain. Dalam penelitian ini, informan utama adalah dua orang dari unit keuangan, sedangkan informan tambahan adalah Bapak Muarifin, Manajer PT ABC yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan.

Tabel 3. Triangulasi Sumber

Pernyataan Penelitian	Informan	Keterangan
Apakah lingkungan pengendalian pada PT ABC sudah dilakukan sesuai SOP?	Informan 1 Struktur organisasi PT ABC telah ditetapkan secara tertulis dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, karena struktur hal yang penting bagi suatu perusahaan sehingga karyawan dapat mengetahui jenis wewenang dan tanggung jawab yang ada.	Struktur organisasi pada PT ABC telah disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dan terperinci untuk menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien. - Unit <i>Finance</i> - Unit Penagihan
	Informan 2 Manajemen PT ABC sudah membuat kebijakan operasional dan kinerja yang efisien hanya saja di beberapa admin memegang beberapa tanggung jawab dalam plant sehingga membuat tagihan yang masuk membutuhkan proses beberapa hari dan melalui pengawasan serta pengendalian yang sudah sesuai dengan syarat operasional perusahaan.	
	Informan 3	

Pernyataan Penelitian	Informan	Informan	Keterangan
	<p>Lingkungan pengendalian yang ada seperti tanggung jawab beberapa admin dalam kinerjanya sudah sangat efisien dan cukup baik, pemisahan tugas per bagian sudah dijelaskan secara terperinci.</p>		
<p>Bagaimana langkah yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi pengendalian resiko?</p>	<p>Informan 1 PT. ABC telah menerapkan prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) untuk mengatasi adanya piutang tak tertagih. Perusahaan sudah menyeleksi sesuai dengan standar prosedur pemberian piutang karena penjualan pasti dilakukan secara kredit</p>	<p>Informan 2 Prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) pasti selalu diterapkan dalam perusahaan, hanya saja dalam perusahaan ini kebetulan hanya satu pelanggan utama yaitu PT WINA yang pada dasarnya sudah dipercayai dalam aspek apapun. PT WINA bukan hanya kali ini melakukan keterlambatan pembayaran namun seringkali di beberapa bulan yang lalu juga mengalami hal yang sama. Tagihan tersebut pasti akan dibayar hanya saja menunggu tingkat perputaran keuangan PT. WINA stabil</p>	<p>Pengendalian resiko yang terjadi menggunakan prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>)</p>
	<p>Informan 3 Dalam mengatasi pengendalian resiko sejak awal berdirinya PT ABC telah menggunakan prinsip 5C yaitu <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>. Sebelum PT ABC sekarang hanya mempunyai satu pelanggan tetap dulunya PT ABC memiliki beberapa perusahaan yang</p>		

Pernyataan Penelitian	Informan	Informan	Keterangan
	<p>bekerja sama untuk mensupplay tenaga kerjanya yang pada akhirnya tersisa satu pelanggan tetap dan utama PT ABC.</p>		
<p>Apakah sudah ada langkah pengendalian dalam mengatasi keterlambatan piutang pada PT ABC?</p>	<p>Informan 1 Perusahaan dalam mengatasi adanya pengendalian piutang ini sebetulnya sudah memiliki cara tersendiri yaitu dengan mempunyai dana cadangan sebesar 3x perputaran penggajian tenaga kerja untuk menghindari dampak dari keterlambatan piutang</p> <p>Informan 3 Belum ada aktivitas pengendalian khusus dalam mengatasi keterlambatan pembayaran piutang ini. Perusahaan hanya bisa <i>follow-up</i> Kembali kepada pihak vendor agar piutang tersebut segera dibayarkan.</p>	<p>Informan 2 SOP perusahaan sudah dilakukan dengan baik namun keterlambatan ini masih mungkin terjadi kurang disiplinnya karyawan sehingga membuat tagihan tersebut molor dari target tanggal yang seharusnya. Tidak hanya itu sistem yang dilaksanakan secara manual membuat semua pekerjaan menjadi lama dalam proses penginputan tagihan</p>	<p>Belum ada langkah pencegahan dalam mengatasi pengendalian keterlambatan tersebut karena, perusahaan hanya melakukan <i>follow up</i> kepada pihak vendor.</p>
<p>Apakah informasi dan komunikasi perusahaan sudah berjalan efektif dan efisien?</p>	<p>Informan 1 Sudah disetujui bersama bahwa PT WINA dalam memberikan informasi melalui email dan sering terjadi miss komunikasi. Dalam hal ini informasi dan komunikasi diantara belum berjalan dengan baik.</p>	<p>Informan 2 Pihak vendor seringkali memberikan informasi melalui sosial media <i>Whatsapp</i> untuk <i>chrosscheck</i> mengenai jumlah <i>invoice</i> yang masuk. Masalah tersebut dapat menimbulkan miss komunikasi juga, karena dari pihak PGA (<i>Personalia & General Affair</i>) dalam proses verifikasi awal</p>	<p>Informasi dan komunikasi yang terjalin antara kerja sama tersebut kurang efektif dan efisien. Masih sering terjadi <i>miss communication</i> diantara kedua belah pihak yang kedepannya dapat merugikan satu sama lain atau bahkan kedua pihak sekaligus.</p>

Pernyataan Penelitian	Informan	Keterangan
	<p>seringkali kurang teliti. Namun kesalahan tidak bisa dipungkiri juga pihak admin juga seringkali tidak mencatat <i>invoice</i> dengan nomor berapa saja yang sudah di verifikasi</p>	
	<p>Informan 3 Informasi dan komunikasi diantara kerja sama ini sangatlah kurang. Terbukti saat kunjungan ke pabrik seringkali admin pihak vendor untuk bertanya perihal <i>invoice</i> dan adanya kesalah pahaman karyawan PT ABC dengan karyawan PT Wina.</p>	
<p>Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal piutang pada PT ABC?</p>	<p>Informan 1 Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pengendalian internal piutang PT ABC tidak memiliki personel di bidang informasi teknologi (IT) dengan tugas khusus mengawasi pemeliharaan sistem (IT) dan menjaga keamanan sistem, pengelolaan data, pemecahan masalah teknis dan pemantauan jika terjadi sesuatu yang mencurigakan dengan sistem (IT) perusahaan saat ini.</p>	<p>Informan 2 Sistem yang digunakan juga masih bersifat tradisional dan belum otomatis sehingga saat ada keterlambatan pembayaran tidak bisa mengetahui secara jelas dan langsung <i>invoice</i> mana yang belum terbayarkan.</p> <p>Kurangnya karyawan yang kompeten dalam bidang IT untuk mengelola pelaksanaan pengendalian piutang secara detail dan otomatis.</p>

Pernyataan Penelitian	Informan	Keterangan
	Informan 3	
	Belum ada pengawasan yang ketat dalam pengendalian internal piutang karena dalam team <i>finance</i> belum ada tugas khusus dalam bidang IT.	

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka, dapat disimpulkan bahwa PT ABC belum menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya keterlambatan pembayaran piutang yang berdampak pada terganggunya administrasi perusahaan. Keterlambatan tersebut jika tidak segera dikendalikan dapat menjadi piutang tak tertagih dan menyebabkan kemacetan arus kas. PT ABC perlu meningkatkan beberapa aspek SPI menurut COSO (*Commitee of Sponsoring Organizations*) seperti aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Perusahaan perlu memperbaharui SOP (*Standard Operating Procedure*) dan menyesuaikan dengan beberapa aspek diatas agar pengendalian internal piutang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang di PT ABC perlu untuk ditingkatkan lagi, dengan menerapkan prosedur-prosedur pengendalian internal yang sebelumnya sudah diterapkan namun dapat diperbaharui dengan menambahkan beberapa aspek untuk kelancaran dalam mengendalikan piutang. PT ABC juga dapat membuat program secara khusus agar semua penjualan kredit beserta rekapan piutang terdata secara otomatis dan mempermudah dalam pembayaran tenaga kerja dari pihak vendor. Dalam mendukung program yang terjadi perusahaan juga dapat menambah karyawan yang bertanggung jawab dibidang IT, sehingga semua dapat terprogram dan terpantau dengan detail dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, F. N., & Ansori, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization (Coso) pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. *Yume: Journal of Management*, 7(3), 13–23.
- Anjarsari, T. A., & Handayani, A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Piutang dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) di PTWAKABE Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01), 96–107. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.504>
- Azizah, N. (2024). Nur Azizah, & Erry Andhaniwati.(2024). Analisis Sistem Pengendalian Piutang pada PT Dbl Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 350–355. <https://doi.org/10.56709/mesman.v3i3.620>
- Dewa, M. M. C., Kharisyami, P. W. Y., Navael, L. D., & Maulana, A. (2022). Peran Akuntan dalam Menghadapi Digitalisasi Ekonomi Menjelang Era Society 5.0. *Jae (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 7(3), 56–67. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18492>
- Diana, A. N. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada KPRI Kokardan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 13(1), 19–28. <https://doi.org/10.36418/covalue.v13i1.996>
- Elisabeth, D. M. (2019). Kajian terhadap Peranan Teknologi Informasi dalam Perkembangan Audit Komputerisasi (Studi Kajian Teoritis). *Methomika: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 40–53.
- Fizriah, L., & Wirananda, H. A. (2022). Analisis Peranan Pengendalian Internal Atas Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas pada PT. Alfa Scorpii. *Journal Economy and Currency Study (Jecs)*, 4(1), 40–48. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.388>
- Handayani, A. (2024). Sistem Pengendalian Internal Kas pada PT XYZ. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 131–157. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v5i1.8115>
- Handayani, F., Rahmat, Z., & Pranata, D. Y. (2022). Survey Model Pembelajaran Penjasorkes di Sd 57 Banda Aceh pada Masa Pandemic Covid. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 3(1).
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Lara, R. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada PT. Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(2), 289–300.
- Malia, T. W., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Piutang Usaha pada PT. Mayora Indah Tbk. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(5).
- Maryani, L., Supraptiningsih, J. D., & Riyanto, D. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha pada PT Demak Indah Kencana. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4739–4746.
- Mulyadi, S. (2023). Sistem Akuntansi Edisi 3. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Pratiwi, F. (2019). *Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Usaha Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan pada PT. Telkomedika di Surabaya*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Pryhanni, R., & Agha, R. Z. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada PT Kaya Raya Turun Temurun. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Pnj*, 4(1).
- Puspasari, A., & Kusnaeni, E. (2019). Pengendalian Internal Piutang pada PT. Saurindotex Mandiri Bekasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 3(1), 29–43.

- Santoso, R. A., & Handayani, A. (2019). *Manajemen Keuangan; Keputusan Keuangan Jangka Panjang*. Gresik: Umg Press.
- Saragih, S. O., & Ardila, I. (2024). Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengendalian Internal Penjualan Kredit. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 4(2), 1018–1024.
- Seftiani, R., & Retnowati, Y. F. (2021). Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada Stasiun TV XYZ. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 116–129.
- Simanjorang, C. N. (2015). *Tinjauan Atas Pengelolaan Piutang pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Bara Ujungberung Bandung*. Universitas Widyatama.
- Susanti, E. Y., Aini, N., & Maskur, M. (2023). Efektivitas Peran dan Strategi Akuntansi Berkelanjutan dalam Mengadapi Tantangan Sustainable Development Goals. *El-Mahasaba*, 3(1).
- Verantika, N., Malau, M., & Sitorus, F. Y. (2017). Sistem Penjualan Kredit Atas Jasa Sewa Kapal Pada Pt. Swakarsa. *Buletin Ekonomi*, 21(2), 8–15.
- Wulandari, A., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2023). Penerapan Pengendalian Internal Atas Sistem Pengeluaran Kas pada PT. Varia Usaha Beton. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 11(1), 1–9.
- Yanti, H. (2021). *Akuntansi Piutang pada PT Banjar Setia Group Kota Medan*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
